

PROSPEK PENERAPAN “CO-
MANAGEMENT” UNTUK
PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PESISIR DI KEPULAUAN
KARIMUNJAWA, JEPARA
(Implementation of “Co-
management” For Coastal
Resources Management In
Karimunjawa Islands, Jepa

Submission date: 03-Jan-2021 03:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 1431600032

File name: Coastal_Resources_Management_In_Karimunjawa_Islands,_Jepara.pdf (617.54K)

Word count: 3370

by Agus Indarjo

Character count: 23079

PROSPEK PENERAPAN “CO-MANAGEMENT” UNTUK PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DI KEPULAUAN KARIMUNJAWA, JEPARA

Implementation of “Co-management” For Coastal Resources Management In Karimunjawa Islands, Jepara

¹Dinar Isyana Syah Rani, ¹Dian Wijayanto, ¹Agus Indarjo, ²Indah Susilowati*

¹Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia;

²Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia;

Email: indahsusilowati@undip.ac.id, indah-susilowati@rocketmail.com

Diserahkan tanggal 19 Maret 2019, Diterima tanggal 30 April 2019

ABSTRAK

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tidak terkontrol menyebabkan tekanan terhadap keberlangsungan ekologi. Penyelesaian masalah tersebut salah satunya dengan kemitraan semua *stakeholder* yaitu dengan kesadaran tentang adanya permasalahan yang terjadi dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis *co-management* sumberdaya pesisir di Kepulauan Karimunjawa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Data penelitian dikumpulkan pada bulan April 2018 dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap informan kunci dengan jumlah 140 orang yang terdiri dari pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dan akademisi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menerapkan konsep *co-management* dengan melihat dari 11 kondisi kunci. Hasil analisis *co-management* menunjukkan perlunya dilakukan kerjasama antara pihak akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah dengan hasil jumlah skor rata-rata 3,17 yang menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan kemitraan sumberdaya perikanan di Kepulauan Karimunjawa dalam kondisi cukup.

Kata kunci: Kepulauan Karimunjawa; pembangunan berkelanjutan; *co-management*

ABSTRACT

The activity of uncontrolled utilization of coastal resources causes pressure on ecological sustainability. One of the solutions to this problem is through the partnership of all stakeholders, with awareness the problems that occur and the responsibility for making decisions. The purpose of this study was to analyze the co-management of Coastal Resources in Karimunjawa Island by involving all relevant stakeholders. The research data was collected in April 2018 by conducting in-depth observations and interviews with key informants with 140 people consisting of according to business needs, government and society and academics. The analysis used in this study used the management concept together with looking at 11 key conditions. The results of co-management analysis indicate the need for cooperation between academics, businesses, communities and the government with the results of an average score of 3.17 indicating that it is related to partnerships in the Karimunjawa Islands in sufficient condition.

Keywords: Karimunjawa Islands; sustainable development; *co-management*

PENDAHULUAN

Kepulauan Karimunjawa merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang terdiri atas empat desa yaitu Karimunjawa, Kemujan, Nyamuk dan Parang. Kepulauan Karimunjawa dikelilingi oleh perairan memiliki sumberdaya pesisir yang sangat melimpah, keindahan alam dan keindahan pantai sehingga menjadi potensi pariwisata yang terkenal. Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 78/Kpts-II/1999 menetapkan Karimunjawa sebagai taman nasional untuk menjaga pelestarian alamnya. Banyaknya keanekaragaman ekosistem memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan kontribusi secara ekonomi (BTNKJ, 2016). Sumberdaya pesisir perlu dimanfaatkan secara lestari, agar kelestarian alam tetap terjaga sehingga diperlukan adanya konsep *co-management*. Kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sumberdaya Kepulauan

Karimunjawa karena masih terbatasnya tenaga yang dimiliki dari masing-masing *stakeholder*.

Kehidupan masyarakat Kepulauan Karimunjawa sangat bergantung dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir. Masyarakat sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan penyedia jasa wisata. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik kunjungan wisatawan ke Kepulauan Karimunjawa mengalami peningkatan baik wisatawan domestik maupun wisatawan jumlah mancanegara. Jumlah pengunjung pada tahun 2013 sebanyak 70.938 wisatawan, tahun 2014 sebanyak 81.235 wisatawan, tahun 2015 sebanyak 92.115 wisatawan (BPS, 2014; 2015; 2016). Kegiatan dalam menangkap ikan dan kegiatan wisata rentan terhadap perusakan lingkungan yaitu penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan kegiatan wisata (*diving/snorkeling*) secara bertahap akan menimbulkan kerusakan ekosistem. Kerusakan terumbu karang, dan terkuras stok sumber daya ikan tanpa diikuti pelestariannya

akan mengakibatkan tekanan di masa mendatang. Kondisi ini membutuhkan perhatian dan peran serta seluruh *stakeholder* yang terdiri atas pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dengan bantuan akademisi atau yang dikenal dengan ABCG (*academic, Business, Community and Government*).

Co-management merupakan pembagian kekuasaan pengguna sumberdaya yang ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Carlsson *et al.*, 2005 dan Berkes, 2009). Musyawarah digunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam *co-management* (Berkes, 2009). (Ratner, Oh, & Pomeroy, 2012) menyatakan tujuan dari *co-management* adalah adanya kolaborasi yang aktif antara pemangku kepentingan yang mempunyai peran masing-masing dalam melakukan pemantauan, penilaian serta penegakan rencana pengelolaan dalam sumberdaya. Pemangku kepentingan dalam *co-management* terdiri atas pengguna sumberdaya, pemerintah, pelaku usaha dan akademisi (Pomeroy & Guieb, 2006) menyatakan bahwa sistem *co-management* digunakan untuk pengaturan kemitraan antara nelayan dan masyarakat lokal yang memanfaatkan sumberdaya, serta pemerintah yang memiliki peraturan atau penegakan hukum. *Co-management* muncul karena adanya permasalahan seperti konflik antara pemangku kepentingan, konflik antara nelayan dengan lembaga manajemen, kerusakan sumber daya serta permasalahan pemerintah (undang-undang konservasi).

Pemanfaatan sumberdaya pesisir oleh manusia untuk perikanan tangkap dan pariwisata harus mendapatkan penanganan yang baik, dengan pertimbangan penjagaan kelestarian sumberdaya pesisir agar berkelanjutan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis *co-management* sumberdaya pesisir di Kepulauan Karimunjawa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan pengelolaan sumberdaya pesisir di Kepulauan Karimunjawa.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan April 2018 di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Pemilihan daerah ini didasari oleh pemikiran bahwa Kepulauan Karimunjawa ditetapkan sebagai Taman Nasional. Masyarakat sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, dan penyediaan jasa wisata. Kedua kegiatan tersebut rentan terhadap perusakan baik lingkungan maupun kerusakan ekosistem

Lingkup dari penelitian ini yaitu proses dan kegiatan untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh *stakeholder* dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan bersama (*co-management*) di Kepulauan Karimunjawa. antara lain meliputi: a) Pengumpulan data primer dilakukan pada bulan April 2018 dengan melakukan observasi dan melalui wawancara mendalam (*indepth-interview*) terhadap responden kunci yang berjumlah 140 orang terdiri dari Dinas Perikanan, Balai Taman Nasional Karimunjawa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa (PPP), Kecamatan, UPT Karimunjawa, Desa, Wisatawan, Jasa Wisata, Himpunan Pramuwisata (HPI), Nelayan, Pembudidaya serta Akademisi (Universitas Diponegoro) b) Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mengumpulkan data tambahan dari dinas dan instansi terkait.

Teknik analisis yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan mengukur 11 kondisi kunci yang dilakukan terhadap *key-person* kepada pihak terkait. *Key person* pada penelitian dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) berdasarkan keahlian, pengetahuan dan penguasaan terhadap kegiatan kelompoknya. Pada proses *indepth interview* dilakukan pencatatan dan perekaman dengan menggunakan audio. Penilaian diuji dengan nilai skor.

(Pomeroy *et al.*, 1994) dan (Susilowati, 2001) mengukur *co-management* dengan melibatkan *key-person* berdasarkan 11 *key-condition* yaitu: 1) Batas-batas yang jelas, 2) Keanggotaan perlu ditentukan 3) Kohesi Group 4) Organisasi yang ada 5) Manfaat dan pengorbanan 6) Partisipasi dari masyarakat yang berpengaruh 7) Penegakan terhadap aturan pengelolaan 8) Hak Hukum untuk berorganisasi 9) Kerjasama dan kepemimpinan di tingkat masyarakat 10) Desentralisasi dan pendelegasian wewenang 11) Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Pada setiap 11 *key condition* diamati dan dilakukan evaluasi dengan menggunakan pengukuran skala *likert* (1 sampai 5) yaitu sangat buruk (1), buruk (2), cukup (3), baik (4) dan sangat baik (5).

Penilaian besarnya kepentingan *stakeholder* berdasarkan tujuan yang hendak dicapai menggunakan skala *likert* yaitu nilai +4 atau -4 (sangat setuju sekali atau sangat tidak setuju sekali), +3 atau -3 (sangat setuju atau sangat tidak setuju), +2 atau -2 (setuju atau tidak setuju), +1 atau -1 (agak setuju atau agak tidak setuju) dan 0 = netral. Pada penilaian, tanda (+) berarti setuju dan tanda (-) berarti tidak setuju. Setelah melakukan identifikasi, kepentingan dan pengaruh, maka dilakukan pemetaan analisis *stakeholder*. Pemetaan analisis *stakeholder* terdiri dari 4 kuadran yaitu penyusun konteks (*Context setters*), pemain kunci (*key players*), subjek (*subject*) dan penonton (*crowd*) (Reed *et al.*, 2009).

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas 11 aspek kunci dalam *co-management*, kebijakan atau peraturan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, kepentingan, pengaruh serta peran dari *stakeholder*. Metode pengumpulan data primer adalah dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada pihak Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Pemerintah

Data sekunder terdiri atas monografi dan demografi Kecamatan Karimunjawa, sumberdaya pesisir di Kepulauan Karimunjawa, Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara, sektor perikanan di Kabupaten Jepara serta obyek wisata dan jumlah wisatawan di Karimunjawa. Data sekunder diperoleh dari dinas atau instansi yang terkait yaitu Kantor Kecamatan Karimunjawa, BTNKJ, Bapeda, Dinas Perikanan, Disparbud dan pustaka yang menunjang penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *Co-management* pada Sumberdaya Pesisir di Kepulauan Karimunjawa

Kunci keberhasilan dalam *co-management* yaitu banyaknya kondisi kunci dalam suatu situasi, maka akan semakin besar kesempatan untuk menuju keberhasilan (Pomeroy *et al.*, 1994). Hasil 11 *Key Condition* yang dilakukan terhadap *key person* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi kunci untuk *Co-management* di Kepulauan Karimunjawa

No	Kondisi Kunci	Keadaan di Lapangan	Evaluasi (Nilai 1 s.d 5)
1	Batas pengelolaan yang jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat batas fisik, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahuinya • Masyarakat dapat memahami dan mengamati batas-batas berdasarkan ekosistem 	3.24
2	Keanggotaan perlu ditentukan	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya masyarakat yang menjadi anggota yang mempunyai hak untuk melakukan pemanfaatan sumberdaya pesisir di daerah yang dibatasi • Anggota ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya pesisir • Jumlah anggota tidak terlalu besar karena dapat membatasi dalam pengambilan keputusan yang efektif 	3.02
3	Kohesi group	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan yang dikelola berada dekat dengan kelompok masyarakat pengguna sumberdaya pesisir • Tingkat homogenitas yang tinggi (kekeluargaan, etnik, agama, kebiasaan, kepercayaan, ideology dan • Paham tentang masalah, strategi dan hasil 	3.43
4	Organisasi yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat sudah memahami tentang sistem berbasis masyarakat tradisional • Masyarakat sudah memahami mengenai keberadaan organisasi • Masyarakat sebagai perwakilan dari stakeholder dan pengguna sumberdaya yang ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya pesisir 	3.06
5	Manfaat melebihi biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan terhadap pengelolaan berbasis masyarakat melebihi biaya instrument • Adanya harapan dari individu yang berasal dari partisipasi 	3.23
6	Partisipasi dari masyarakat yang berpengaruh	<ul style="list-style-type: none"> • Orang yang mengumpulkan informasi tentang sumberdaya pesisir juga membuat keputusan tentang pengaturan pengelolaan • Pengaturan pengelolaan sebagian besar mempengaruhi individu yang membuat dan merubah pengaturannya 	3.05
7	Penegakan terhadap aturan pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Semua masyarakat pengguna sumberdaya pesisir dapat melakukan penegakan hukum dan pemantauan • Aturan pengelolaan sumberdaya perikanan secara sederhana 	2.88
8	Hak Hukum untuk berorganisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah mempunyai peraturan untuk menentukan dan mengklarifikasi tanggung jawab dan kewenangan • Hak hukum dimiliki oleh organisasi/kelompok dalam membuat dan mengatur pengaturan sesuai dengan kebutuhannya 	3.24
9	Kerjasama dan kepemimpinan di tingkat masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Secara aktif masyarakat mempunyai kemauan dan insentif untuk ikut berpartisipasi (uang, waktu, tenaga, uang) dalam pengelolaan sumberdaya pesisir • Pada proses pengelolaan terdapat kelompok individu yang mempunyai tanggung jawab dalam kepemimpinan 	3,27
10	Desentralisasi dan pendelegasian wewenang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah telah menetapkan kebijakan/peraturan untuk desentralisasi dari fungsi administrative • Adanya pendelegasian tanggung jawab/wewenang dengan pendekatan kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir 	3.27
11	Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dalam melakukan pemantauan pengaturan pengelolaan, penyelesaian konflik, memperkuat penegakan perda dengan melakukan pendekatan kemitraan • Pendekatan kemitraan akan memudahkan dalam koordinasi antar stakeholder 	3.21
Skor Total			34.96
Skor Rata-Rata			3.17

Skala Penilaian:

(1)Sangat buruk (2) Buruk (3) Cukup (4) Baik (5) Sangat baik

Hasil dari 11 *key condition* didapatkan jumlah total skor penilaian untuk prospek keberhasilan pendekatan kemitraan pada sumberdaya perikanan di Kepulauan Karimunjawa yaitu 34,96, dengan skor rata-rata yaitu 3.17. Skor berada pada skala penilaian angka 3. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan kemitraan sumberdaya perikanan di Kepulauan Karimunjawa dalam kondisi cukup. Aspek yang menjadi prioritas utama yaitu kohesi group (3.43), kerjasama dan kepemimpinan ditingkat masyarakat serta desentralisasi dan pendelegasian wewenang dengan skor yang sama (3.27), dan batas pengelolaan serta hak hukum untuk berorganisasi dengan skor yang sama (3,24). Hal ini dapat diidentifikasi dari wawancara *key person*, bahwa akademisi, pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat mengetahui dan memahami batas-batas wilayah pesisir yang dikelola. Masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama dalam proses kegiatan. Adanya aturan yang dapat dipahami oleh masyarakat membuat masyarakat dapat mengetahui dan ikut serta dalam proses kemitraan. Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dengan adanya peraturan diharapkan lebih terorganisir dengan baik. Pada penelitian Suharno (2017) aspek yang mempunyai prioritas utama adalah ketiga aspek yang mempunyai skor paling tinggi yaitu aspek kerjasama, aspek desentralisasi dan koordinasi. Ketiga aspek tersebut saling mendukung untuk memperoleh nilai rata-rata tertinggi.

Nilai rata-rata setiap *stakeholder* pada 11 kondisi kunci terdiri atas akademisi (3.56), pemerintah (3.38), pelaku usaha (2.56), dan masyarakat (3.08). Hal ini menunjukkan bahwa untuk keberhasilan pendekatan kemitraan untuk akademisi mendekati nilai 4 yang berarti baik. Pemerintah dan masyarakat berada dalam kondisi cukup untuk pendekatan kemitraan. Sedangkan pelaku usaha memiliki nilai yang paling rendah dengan nilai mendekati 3 yaitu masih dalam kondisi buruk belum pada kondisi cukup.

Keterlibatan masyarakat untuk pengelolaan sumberdaya perikanan di Kepulauan Karimunjawa sangat cocok untuk dilakukan *co-management*. Masyarakat Karimunjawa lebih memahami kondisi sumberdaya pesisir yang ada di Kepulauan Karimunjawa karena hidup dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan selama bergenerasi. Pomeroy *et al* (1994) menyebutkan bahwa tujuan dari *co-management* yaitu pembagian tanggung jawab atau kewenangan antara nelayan lokal, masyarakat dan pemerintah untuk mengelola perikanan. Rasa kepercayaan dibutuhkan oleh semua pihak yang ikut terlibat dalam pengelolaan bersama.

Berdasarkan hasil *indepth-interview* responden kunci bahwa *co-management* dalam mengelola sumberdaya pesisir Kepulauan Karimunjawa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, peran seluruh stakeholder dan masyarakat ikut dilibatkan dalam menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan. Pemerintah sangat terbatas kemampuannya sehingga peran dari masyarakat diperlukan. Masyarakat harus diberdayakan dalam bentuk pelatihan serta ikut dalam sosialisasi kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan. Agar kesadaran masyarakat tentang kelestarian sumberdaya dapat terjaga. Pemerintah dalam menjaga kelestarian sumberdaya perikanan harus ikut serta dalam mengawasi, mengontrol serta menjaga. Akademisi ikut berkontribusi dalam pengembangan Kepulauan Karimunjawa. Terjaganya sumberdaya pesisir baik sektor perikanan dan sektor wisata dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat

dan devisa negara. Menurut (Molamohamadi & Zohreh, 2014) tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu untuk melestarikan dan mempertahankan sumberdaya yang seefisien mungkin untuk diterapkan kepada masyarakat sekarang dan generasi masa depan. Sebagai upaya pengelolaan sumberdaya pesisir di Kepulauan Karimunjawa diharapkan dapat terjadi pembagian tanggung jawab atau kewenangan antara pemerintah, masyarakat maupun pihak akademisi untuk mengelola sumberdaya pesisir di Kepulauan Karimunjawa.

Hubungan Kemitraan antar Stakeholder

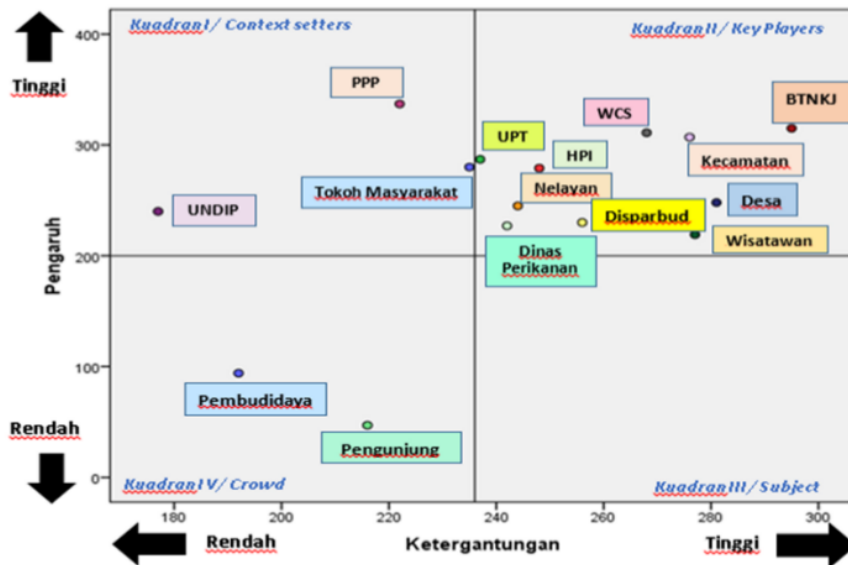
Hubungan kemitraan antar *stakeholder* pada sumberdaya pesisir di Kepulauan Karimunjawa dapat dilihat dengan matriks pemetaan. Matriks pemetaan menggunakan hubungan antara ketergantungan dan pengaruh antar *stakeholder*. Pemetaan analisis *stakeholder* terdiri dari 4 kuadran yaitu penyusun konteks (*Context setters*), pemain kunci (*key players*), subjek (*subject*), dan penonton (*crowd*) (Reed *et al.*, 2009). Pemetaan analisis *stakeholder* berdasarkan tingkat ketergantungan dan pengaruh dalam pengelolaan Kepulauan Karimunjawa dilihat pada gambar 1.

Hasil pemetaan *stakeholder*, pada kuadran I diklasifikasikan sebagai penyusun konteks (*context setters*) yaitu *stakeholder* memiliki tingkat ketergantungan (*dependence*) rendah dan pengaruh (*influence*) tinggi. *Stakeholder* harus selalu dipantau dan dikelola karena akan menimbulkan resiko (Reed *et al.*, 2009). *Stakeholder* yang diklasifikasikan pada klasifikasi ini yaitu PPP, Tokoh Masyarakat dan UNDIP.

Kuadran II diklasifikasikan sebagai pemain kunci (*key players*) yaitu *stakeholder* memiliki tingkat ketergantungan tinggi dan pengaruh tinggi. Secara penuh *stakeholder* secara aktif (Reed *et al.*, 2009). Dinas perikanan berperan untuk mengelola kegiatan perikanan secara berkelanjutan dengan melibatkan BTNKJ, kecamatan Karimunjawa, desa di Karimunjawa, UPT Karimunjawa, dan WCS. Pada pelaksanaannya, pengelolaan sumberdaya perikanan juga melibatkan nelayan untuk berbagi peran dalam melaksanakan kegiatannya. Disparbud diberikan peran untuk mengelola jasa lingkungan pesisir secara berkelanjutan dengan melibatkan HPI, Jasa Wisata dan WCS.

Kuadran III diklasifikasikan sebagai subjek (*subject*) yaitu *stakeholder* memiliki ketergantungan (*dependence*) tinggi namun memiliki pengaruh (*influence*) rendah. Dalam mencapai tujuan *stakeholder* mempunyai kapasitas rendah, tetapi akan menjadi berpengaruh saat membentuk aliansi dengan *stakeholder* lainnya (Reed *et al.*, 2009). Pada matriks pemetaan *stakeholder*, tidak ada *stakeholder* yang berada pada klasifikasi ini, berarti tidak ada *stakeholder* yang memiliki kekuatan untuk memberikan dampak, meskipun *stakeholder* dapat memberikan pengaruh dengan membentuk aliansi dengan *stakeholder* lain.

Kuadran IV diklasifikasikan sebagai *Crowd* yaitu *stakeholder* memiliki tingkat ketergantungan (*dependence*) rendah dan pengaruh (*influence*) rendah. Pertimbangan perlu dilakukan untuk melibatkan *stakeholder* karena seiring berjalannya waktu ketergantungan dan pengaruh akan selalu mengalami perubahan (Reed *et al.*, 2009). *Stakeholder* yang diklasifikasikan pada penelitian ini yaitu Pembudidaya dan Pengunjung Wisata. Pada posisi ini *stakeholder* bukan sebagai pengambil kebijakan atau peraturan hanya bersifat pelaksana



Gambar 1. Pemetaan analisis stakeholder

KESIMPULAN

Co-management dilakukan dengan 11 key condition yang menempatkan *academic, Business, Community and Government* yang diharapkan dapat saling bekerja sama dalam pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab atau kewenangan antara pemerintah. Hasil analisis *co-management* menunjukkan perlunya dilakukan kerjasama antara pihak akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah dengan hasil jumlah skor rata-rata 3,17 yang menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan kemitraan sumberdaya perikanan di Kepulauan Karimunjawa dalam kondisi cukup. Hasil analisis pengelolaan Kepulauan Karimunjawa dari *key person* dengan mendasarkan pada analisis terhadap *stakeholder* adalah pengelolaan *co-management cooperative* dengan menempatkan pemerintah dan pengguna sumberdaya saling bekerja sama dalam pengambilan keputusan. *Stakeholder* yang merupakan pemain kunci (*key players*) dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan di kepulauan Karimunjawa yaitu Dinas Perikanan, BTNKJ, Disparbud, Kecamatan, UPT Karimunjawa, Desa, Jasa Wisata, HPI, Nelayan, serta WCS. Pengelolaan Kepulauan Karimunjawa mempunyai tujuan untuk menjaga kelestarian kawasan, menjaga penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, meningkatkan hasil penangkapan ikan, menjaga kelestarian terumbu karang serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengelolaan kolaboratif menjadi alternatif dalam mengembangkan kemitraan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan untuk menuju pembangunan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Instansi, akademisi, komunitas, serta masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam penelitian dan Dr. Izza

Mafruhah, SE, M.Si, Dosen Fakultas Ekonomi dan Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan masukan dan arahan dalam menyusun artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- 8 Berkes, F. 2009. Evolution of *Co-management*: Role of Knowledge Generation, Bridging Organizations and Social Learning. *Journal of Environmental Management*, 90(5): 1692–1702. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.12.001>
- BTNKJ. (2016). Balai Taman Nasional Karimunjawa. *Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2016*, 1–14.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. *Statistik Daerah Kecamatan Karimunjawa 2014*, Kabupaten Jepara, 442 hlm.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Daerah Kecamatan Karimunjawa 2015*, Kabupaten Jepara, 24 hlm.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Daerah Kecamatan Karimunjawa 2016*, Kabupaten Jepara, 18 hlm.
- 2 Carlsson, L and F. Berkes. 2005. *Co-management*: Concepts and Methodological implications. *Journal of Environmental Management*. 75(1): 65–76. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2004.11.008>
- Molamohamadi, Z and N. ISmail. (2014). The Relationship between Occupational Safety, Health, and Environment, and Sustainable Development: A Review and Critique. *International Journal of Innovation, Management and Technology*. 5(3). <https://doi.org/10.7763/IJIMT.2014.V5.513>
- 2 Pomeroy, R. S and R.Rivera-Guieb. 2006. *Fishery Co-Management A Practical Handbook*. Canada: CAB International.

6

Pomeroy, R.S and M.J. Williams. 1994. Fisheries Co-Management and Small-scale Fisheries: A Policy Brief. International Center for Living Aquatic Resources Management.

<https://doi.org/http://www.worldfishcenter.org/libinfo/Pdf/Pub%20M5P65%201994.pdf>

1

Ratner, B. D., E. J. V. Oh, and R.S Pomeroy. 2012. Navigating Change: Second-Generation Challenges of Small-Scale Fisheries *Co-management* in the Philippines and Vietnam. *Journal of Environmental Management*. 107: 131–139. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.04.014>

Reed, M. S., A. Graves., N. Dandy., H. Posthumus., K. Hubacek., J. Morris., C. Prell., C.H. Quinn., L.C. Stringer. 2009. Who’s in and Why? A Typology of *Stakeholder Analysis* Methods for Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management*. 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>

Susilowati, I. (2001). Prospect of *Co-management* Approach in Managing Fisheries in Indonesia: Closer Look on Ikan Larangan (“Forbidden Fish Farming”). *Journal of Coastal Development*.5(1): 41–45.

PROSPEK PENERAPAN "CO-MANAGEMENT" UNTUK PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DI KEPULAUAN KARIMUNJAWA, JEPARA (Implementation of "Co-management" For Coastal Resources Management In Karimunjawa Islands, Jepa

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Mamun, Abdullah Al. "Leadership in Community-Based Organizations: What Fisheries Comanagement Teaches Us?", International Journal of Social Science Research, 2015.
Publication 1%
- 2 Rashidpour. "The Pattern of Local Community-Based Management for Sustainable Rural Development in West Azarbaijan Province", American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 2010
Publication 1%
- 3 Arief Luqman Hakim. MATRIK, 2018
Publication <1%
- 4 Riesti Triyanti, Indah Susilowati. "ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR BERKELANJUTAN DI KABUPATEN <1%

GUNUNGKIDUL", Jurnal Kebijakan Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2019

Publication

5

Adhitya Adhyaksa, Samsul Bakri, Trio Santoso. "LAND COVER EFFECT TO THE INCIDENCE OF Pneumonia ON TODDLERS IN LAMPUNG PROVINCE", Jurnal Sylva Lestari, 2017

Publication

<1%

6

Sugimoto, Aoi, Maria Lourdes San Diego-McGlone, Francisco Paciencia, Shielameh P. Milan, Elizabeth T. Tomas, Carolina C. Ramirez, Annabelle Echavez, Jessem Gabatin, Miguel D. Fortes, and Kazuo Nadaoka. "Co-Management for Aquaculture: Suggestions from a Comparative Study between Two Major Production Areas of Milkfish in the Philippines", Journal of Applied Aquaculture, 2016.

Publication

<1%

7

Erik W. Kolstad, Oda N. Sofienlund, Hanna Kvamsås, Mathew A. Stiller-Reeve et al. "Trials, Errors, and Improvements in Coproduction of Climate Services", Bulletin of the American Meteorological Society, 2019

Publication

<1%

8

C. A. Etiegni, K. Irvine, M. Kooy. "Playing by whose rules? Community norms and fisheries rules in selected beaches within Lake Victoria

<1%

(Kenya) co-management", Environment,
Development and Sustainability, 2016

Publication

9

Farichatun Nisa'. "MANAJEMEN
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR,
PUTING BELIUNG, DAN TANAH LONGSOR DI
KABUPATEN JOMBANG", JKMP (Jurnal
Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014

Publication

<1%

10

Imre Keseru, Thierry Coosemans, Cathy
Macharis. "Stakeholders' preferences for the
future of transport in Europe: Participatory
evaluation of scenarios combining scenario
planning and the multi-actor multi-criteria
analysis", Futures, 2020

Publication

<1%

11

Bambang A Wibowo, Aryo B Aditomo, Kukuh E
Prihantoko. "Community Participation Of Coastal
Area On Management Of National Park,
Karimunjawa Island", IOP Conference Series:
Earth and Environmental Science, 2018

Publication

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On